

Baik dikaitkan dengan pandangan Malik dan Syafi'i bahwa akad *Muḍārabah* seperti itu tidak boleh lagi *fasid* (rusak) maupun dikaitkan dengan pandangan Abu Hanifah bahwa akad *Muḍārabah* seperti itu boleh tapi syarat adanya jaminan tersebut batal (tidak sah), fakta mengenai pelaksanaan akad *Muḍārabah* oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yang mensyaratkan para *muḍāribnya* untuk menyerahkan jaminan BPKB atau sertifikat tanah memperlihatkan dengan jelas kesenjangan dengan norma hukum Islam. Idealnya, sebagai lembaga keuangan mikro yang menggunakan label syariah, akad-akad muamalah yang diimplementasikan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera harusnya selaras atau sejalan dengan norma-norma syariah. Karena itu apa yang secara lahir diperlihatkan fakta di atas penting dikaji dan diklarifikasi lebih lanjut dengan seksama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, terutama menyangkut alasan dan pertimbangan hukum Islam yang melandasi tindakan mempersyaratkan *muḍārib* menyerahkan jaminan, juga menyangkut kriteria yang digunakan dalam memutuskan pengenaan tanggungjawab pengembalian modal atas *muḍārib* yang mengalami kegagalan usaha. Kajian dan penelusuran ini tentu saja merupakan kerja akademik yang penting karena di balik fakta yang tampak ke permukaan itu boleh jadi terdapat hal-hal yang substansial untuk nalar dan pertimbangan hukum Islam. Demikianlah, maka penelitian ini dilakukan.

Hasil penelitian Maskuri menunjukkan bahwa akad pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo prosesnya dimulai dari pengisian formulir permohonan dan kelengkapannya oleh nasabah. Sesudah itu bank menganalisis kelayakan dari permohonan yang diajukan nasabah tersebut. Bila bank yakin, maka kebenaran dan kelengkapannya akan diperiksa, kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan pencairan dana yang dibutuhkan nasabah. Jenis resiko yang terjadi dalam pembiayaan *Muḍārabah* adalah *side streaming*, *default*, dan penipuan oleh nasabah yang tidak jujur. Untuk menganalisis kegiatan nasabah, BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo menggunakan prinsip 5-C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*. Sedangkan untuk mengendalikan resiko, BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo melakukan pengawasan, menjadwalkan kunjungan, dan mencermati laporan realisasinya. Maskuri mengakhiri kajiannya dengan mengartikulasikan analisisnya dari perspektif hukum Islam terhadap fakta “manajemen resiko” di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo tersebut sebagai berikut: 1) Manajemen resiko *side streaming* yang dilakukan dengan menekankan pada syarat-syarat pembiayaan yang sehat pada metode *the five ‘c’ of financing* adalah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam berupa kejujuran, amanah, dan tanggungjawab. Sedangkan *side streamingnya* sendiri haram dilakukan berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Anfal* ayat 27. 2) Manajemen resiko kelalaian atau kesalahan yang disengaja dengan melakukan analisa pembiayaan serta objektif adalah sejalan dengan hukum Islam bahwa kesalahan yang tidak disengaja

Dari lima karya tulis di atas ternyata sudah ada satu karya tulis yang meletakkan jaminan dalam akad pembiayaan modal sebagai obyek kajiannya, yakni karya tulis Su'udiyah berjudul "Aplikasi Tabungan *Mudharabah* Sebagai Jaminan di PT. BRI Syari'ah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam". Sebagaimana tercermin dalam kesimpulan yang menjadi penutup kajiannya, Su'udiyah melihat "aplikasi tabungan *Mudārabah* sebagai jaminan" tersebut dari perspektif hukum gadai dan hukum riba. Inilah segi yang membuat kajian yang dilakukan Su'udiyah pada tahun 2008 yang lalu berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan ini.

Menurut penulis, jaminan dalam akad pembiayaan modal (*Mudārabah* dan *musyarakah*) tidak relevan untuk dilihat dari perspektif hukum gadai (*rahn*) dan hukum riba. Alasannya, hukum gadai berkenaan dengan hutang (*qardh*) dan hukum riba berkenaan dengan hutang dan jual-beli. *Mudārabah* dan *musyarakah* jelas bukanlah akad hutang dan bukan pula akad jual-beli. *Mudārabah* adalah akad kerjasama antara pemodal dan pengusaha, sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara sesama pemodal (penyertaan modal). Kedua jenis akad ini berjalan dengan prinsip kemitraan di mana resiko untung dan rugi ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Karena itu, sebagaimana terlihat pada rumusan masalah di atas, kajian yang akan penulis lakukan di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong Tuban ini meletakkan masalah praktik adanya jaminan dalam akad pembiayaan *Mudārabah* sebagai obyek yang akan dikaji dari sudut hukum *Mudārabah* juga. Fakta tentang pembebanan tanggungjawab resiko kerugian usaha ke pundak *mudārib* juga

resiko kerugian dalam akad *Muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban dengan norma tentang jaminan dan penanggungan resiko kerugian dalam akad dalam *Muḍārabah* hukum Islam. Deskripsi dan verifikasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada kerangka atau *outline* yang telah disiapkan sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil penelitian ini disistematisasi dalam bangunan bahasan yang terdiri dari lima bab. Berbagai aspek seputar rancangan penelitian dimuat dalam bab pertama yang merangkai sub-sub bab mengenai “Latar Belakang Masalah”, “Rumusan Masalah”, “Kajian Pustaka”, “Tujuan Penelitian”, “Kegunaan Hasil Penelitian”, “Definisi Operasional”, “Metode Penelitian”, dan “Sistematika Bahasan”.

Bab kedua menyajikan deskripsi mengenai “Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam *Muḍārabah*”. Sesuai dengan variabel-variabel pokoknya, deskripsi pada bab ini dituangkan dalam dua sub bab, yakni “Jaminan (*Rahn*) dalam *Muḍārabah*” dan “Penanggungan Resiko Kerugian dalam *Muḍārabah*”. Penyajian lebih awal hasil penelitian bibliografik tentang sisi-sisi normatif dari kedua pokok ini dimaksudkan untuk menyediakan landasan pijak bagi analisis verifikatif (pengujian) yang akan dilakukan pada tahap berikutnya nanti.

Deskripsi pada bab ketiga memasuki wilayah praksis atau wilayah implementasi. Dengan tajuk “Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam

Muḍārabah: Fakta Implementasinya di KJKS MT Bina Umat Sejahtera, Montong, Tuban” bab ini memilah deskripsinya dalam tiga sub bab, yaitu “Profil Subyek Penelitian”, “Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*”, dan “Implementasi Penanggung Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*”.

Berbagai sajian deskripsi pada bab kedua dan ketiga itu kemudian dirangkai dalam suatu analisis verifikatif yang dituangkan dalam bab keempat dengan tajuk “Implementasi Jaminan dan Penanggung Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS MT Bina Umat Sejahtera, Montong Tuban dalam Perspektif Hukum Islam”. Analisis dalam bab ini diarahkan pada dua variabel pokok penelitian ini yang dicerminkan dalam judul-judul dua sub babnya, yaitu “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah*” dan “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Penanggung Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍārabah*”.

Sebagai penutup, bab kelima menyajikan “kesimpulan”, yakni jawaban ringkas atas pertanyaan yang menjadi titik-tolak diselenggarakannya penelitian ini, dan “saran” kepada pihak-pihak terkait sepanjang relevan dengan hasil penelitian ini.

aspek penanggungan resiko kerugian usaha. Jika KJKS BMT Bina Umat Sejahtera tidak siap dengan resiko menanggung kerugian yang menjadi konsekuensi logis dalam akad *mudrabah* yang bersubstansikan kerjasama, maka penulis sarankan untuk beralih ke skema akad yang tidak bersubstansikan kerjasama semisal jual-beli *murabahah*. Dengan cara ini, resiko menanggung kerugian dapat dihindari tanpa perlu menabrak norma-norma hukum Islam.

